



INDEKS BERITA ■ ■ ■

4

Petani Bisa Sejahtera Melalui Koperasi

6

SPI Pasaman Barat Lakukan Aksi Pendudukan Lahan

9

NTP Pangan Mei 2015 (Sudah) Turun, Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras



" Hentikan konversi lahan! Tetaplah menanam padi untuk kedaulatan pangan "

*Jekson Purba
SPI Kabupaten Serdang Bedagai*

Surga Kopi di Lereng Gunung Kaba

Lereng Gunung Kaba dijuluki surga kopi bagi mereka yang sudah mengunjunginya. Kopi yang tersebar di sini mulai dari species robusta dan arabika. Gunung Kaba terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya diapit dua kabupaten: Kepahiang dan Rejang Lebong. Simak ulasannya lebih lanjut di edisi Pembaruan Tani bulan ini.



Surga Kopi di Lereng Gunung Kaba



(Foto). Kopi siap petik milik petani SPI di Lereng Gunung Kaba, Bengkulu.

BENGKULU. Lereng Gunung Kaba dijuluki surga kopi bagi mereka yang sudah mengunjunginya. Kopi yang tersebar di sini mulai dari species robusta dan arabika.

Gunung Kaba terletak di Provinsi Bengkulu, tepatnya diapit dua kabupaten: Kepahiang dan Rejang Lebong. Di sinilah pusat kegiatan kopi Bengkulu. Ada 63 ribu jiwa yang bekerja terkait penanaman kopi di sekitar 93 ribu hektar lahan.

Namun bukan berarti "surga kopi" di Bengkulu ini aman dari masalah. Petani di sana masih jauh dari sejahtera. Produksi kopi robusta dan arabika di Kepahiang dan Rejang Lebong masih menyimpan banyak masalah.

Rata-rata produksi robusta di lereng Gunung Kaba masih rendah. Petani kopi di sini masih belum terbiasa dengan cara budidaya kopi yang benar. Mayoritas tak bisa memproses pascapanen. Hampir semuanya juga masih menjual ke pengepul atau tengkulak.

Penyuluhan atau pelatihan tentang kopi juga sangat minim. Tanaman kopi dibiarkan begitu saja. Petani belajar, hidup dari kopi dengan cara mereka sendiri. Ujar-ujar petani kopi Bengkulu, "otodidak" saja, kata mereka ringan.

Jamur batang, penggerek buah, semuanya bisa ditemui di lereng Gunung Kaba. Tak ada yang diurus serius.

Penjualan hasil panen kopi ke pengepul atau ke pedagang di ibukota kabupaten juga tak diproses dengan baik. Para petani kopi Bengkulu masih menjual kopi asalan, alias tak cuma buah merah segar. Semua dipetik: hijau, kuning, oranye, bahkan yang busuk sekalipun.



(Foto). Sambil menjemur kopi, para petani SPI berdiskusi untuk dapat menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik

Inilah yang membuat harga yang diterima petani kopi juga tak begitu tinggi. Harga jual robusta basah “cuma” Rp 2.700 per kilogram. Panen raya yang biasanya menghasilkan 2 ton per hektar harus dicukupkan untuk penghasilan keluarga tani setahun. Miris!

Koperasi Serikat Petani Indonesia

Kemirisan ini jelas menjadi perhatian para petani kopi Bengkulu.

Tak bisa diam, mereka mengontak Serikat Petani Indonesia (SPI) beberapa tahun lalu. Beberapa mengeluhkan masalah kasus tanah di Bengkulu. Beberapa lagi menyiratkan keinginan untuk membangkitkan kopi di sana. Intinya, harus berorganisasi. Petani harus bersatu. Mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan SPI.

Pendek kata, akhirnya petani kopi Bengkulu bersuara bulat. Surga kopi di lereng Gunung Kaba harus terus menjadi surga bagi masyarakat. Diperbaiki. Bersama-sama, dengan organisasi. Akhirnya, para petani ini sudah belajar budidaya, pengendalian hama, hingga proses pascapanen.

Walau masih jauh dari ideal, petani kopi Bengkulu kini lebih optimis. Ratusan kepala keluarga kini bahu-membahu menyusun rencana pengembangan kopi di Kepahiang. Koperasi mereka dirikan tahun 2015 ini. Tujuannya jelas, agar petani kopi Bengkulu bisa sejahtera dari surga di Lereng Gunung Kaba.

Saat ini koperasi bergerak untuk memenuhi kebutuhan sembako anggota. Selain itu, utamanya jelas untuk menjual kopi produksi mereka.

Produk kopi Koperasi SPI di lereng Gunung Kaba meliputi kopi robusta dan arabika. Dalam jumlah kecil ada robusta yang diproses natural, yang kini banyak dicari di Jakarta.

Kopi arabika di lereng Gunung Kaba sudah cukup terkenal. Mulai dari rasa yang juara hingga beberapa tahun lalu ada demam luwak. Di beberapa kedai kopi di Jakarta, kita bisa menemukan kopi arabika Kepahiang.#

**Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan & Keadilan Sosial**

www.spi.or.id

Wawancara dengan Sasmitra, Petani Kopi SPI Kepahiang, Bengkulu

Petani Bisa Sejahtera Melalui Koperasi



(Foto). Sasmitra, petani kopi sekaligus Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kepahiang, Kabupaten Bengkulu.

JAKARTA. Minggu, 10 Mei 2015 lalu, petani kopi Serikat Petani Indonesia (SPI) berhasil memukau para penikmat kopi dalam acara Chompagro ke-4 bertema Artisanal Bengkulu. Dalam acara yang digelar di bilangan Kemang, Jakarta Selatan ini para petani bertemu langsung dengan pembeli sekaligus penikmat kopi yang ternyata sangat menikmati citarasa kopi khas Bengkulu ini.

Berikut wawancara redaksi website spi.or.id dengan Sasmitra, petani kopi berusia 24 tahun yang juga Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang mempresentasikan kopi khas Bengkulu dalam acara Chompagro kemarin.

Tanya: Sudah berapa lama menanam kopi?

Jawab: Orang tua yang mulai nanam kopi, sejak saya lahir, kira-kira dari tahun 1990 mulai menanam kopi bersama petani lainnya.

Tanya: Ada berapa orang petani SPI yang menanam kopi?

Jawab: Semuanya menanam kopi dan juga sayuran-sayuran.

Tanya: Ada berapa anggota koperasi SPI?

Jawab: Anggota koperasi saat ini sudah 200-an petani dan insya Allah akan terus bertambah

Tanya: Sejak kapan berdiri koperasi SPI?

Jawab: Koperasi wacananya dari 2014, sahnya Januari 2015 ini, setelah disahkan ke Dinas Koperasi buat akte notaris.

Tanya: Mengapa bergabung dengan SPI dan selanjutnya membuat koperasi?

Jawab: Awalnya bergabung dengan SPI karena konflik lahan. Dulu kami berkonflik dengan pihak kehutanan BKSDA, Taman Wisata Alam Bukit Gapa. Tahun 2012 mulai dikenalkan dengan SPI, dan akhirnya kami bergabung. Untuk saat ini petani udah aman, sudah bisa berproduksi dengan produktif, walau kasusnya masih berjalan. Jadi sekarang kita di SPI tidak hanya mengurus konflik lahannya, tapi juga bagaimana petani berdaulat atas pangan, sumber daya alam, dan mandiri di ekonomi.

Oleh karena itu kita para pengurus berinisiatif untuk membuat

koperasi petani, karena harga jual kopi di tingkat petani yang kadang naik dan turun. Setelah berdiskusi, akhirnya muncul kesimpulan agar kita petani membuat lembaga perdagangannya sendiri salah satunya ya lewat koperasi yang paling bagus karena modal dari kita sendiri, kita yang mengelola sendiri, dari kita untuk kita.

Tanya: Berarti masalahnya di penjualan? Tengkulak?

Jawab: Iya itu juga permasalahan, arena rantai perdagangan kopi cukup panjang. Apalagi di daerah kami ada tengkulak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Bayangkan kalau potongannya Rp 1.000 di masing-masing tengkulak. Belum lagi tengkulak di tingkat provinsi sampai ke tingkat eksportir.

Tanya: Apa saja yang dijual koperasi SPI di sana?

Jawab: Untuk saat ini koperasi menjual kopi robusta, menerimanya dari para petani anggota.



(Foto). Acara Chompagro, acara yang mempertemukan penikmat kopi dengan petani kopi langsung, digelar di Kemang, Jakarta (10/05).

Tanya : Katanya sekarang ini biji kopi robusta yang dipetik cuma yang merah ?

Jawab : Ya, ini juga salah satu kontribusi organisasi SPI kepada petani anggotanya yakni memberikan dukungan untuk pengolahan kopi, pelatihan-pelatihan budidaya, pasca panen, dan pemasaran. Soal robusta petik merah ini kami dapat juga setelah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dulu kami memetik kopi asalan saja, hijau, kuning pun kami petik. Alhasil kualitasnya juga tidak maksimal. Saat ini saja harga robusta petik asal sekitar Rp 18.000 – 19.000 untuk yang kering, kalau robusta petik merah pasti harganya lebih tinggi.

Tanya : Apa yang dilakukan koperasi untuk membuka akses pemasaran kopi petani anggotanya?

Jawab : Acara Chompagro di Jakarta ini adalah salah satu contohnya, jadi petani bisa memasarkan kopinya langsung ke pembeli. Mudah-mudahan kita bisa buat acara sejenis ini di Bengkulu bekerjasama dengan Pemda setempat. Semuanya ini akan difasilitasi oleh koperasi, karena ternyata pembeli lebih cenderung mau membeli kopi dari suatu lembaga yang jelas seperti koperasi.

Tanya : Bagaimana kesan dari acara Chompagro kemarin? Bisa langsung jumpa dengan konsumen pencinta kopi dan lainnya.

Jawab : Kesannya luar biasa, karena kami sangat jarang bisa jumpa langsung dengan konsumen. Ternyata produk dan hasil bumi yang kita petani tanam, harga di tingkat konsumennya begitu jauh. Ternyata ada yang membuat harga dari petani ke tingkat konsumen bisa begitu mahal. Kita petani pun kaget dengan harga jual di tingkat petani dengan harga jual di tingkat konsumen. Contohnya arabika Kepahiang harganya Rp 40.000 per kilogram untuk yang biji hijau (green bean), sedangkan di tangan konsumen harganya bisa dua kali lipa, bahkan lebih. Anehnya rasa kopi kita ternyata juga bisa beda, bisa dibuat aneh-aneh rasanya, dengan peralatan yang lebih terkini.

Tanya : Disana, apakah para petani minum kopi yang diproduksinya sendiri ?

Jawab : Iya, kalau mau ngopi kami petani petik sendiri. Tapi petiknya masih asalan.

Tanya : Pengetahuan apa saja yang didapatkan selama pelatihan-pelatihan dari SPI dan Puslitkoka ?

Jawab : Alhamdulillah cukup banyak, pertama dari ilmu pengolahan, sekarang kita petani sudah mengerti jarak tanam ideal untuk menanam kopi, dan standar penanaman yang ideal. Kita petani juga jadi mengerti kalau menanam kopi ternyata butuh pupuk supaya buah kopinya bagus. Kita juga jadi mengerti penanganan penyakit kopi. Selanjutnya soal pengolahan pasca panen, harus petik merah, dirambang, tidak dijemur di tanah, selama ini itu tidak kita lakukan, kita menjemur kopi di tanah sampai berbulan-bulan sampai biji kopinya berjamur, akhirnya kualitasnya pun jelek. Setelah pelatihan-pelatihan kemaren, kita petani semakin mengerti perlakuan ke kopi agar kualitasnya bagus. Pelatihan-pelatihan tersebut sangat berguna.

Tanya : Apa harapan ke depannya, setelah akhirnya bisa berjumpa langsung dengan konsumen, setelah mengerti pemasaran dan pengolahan pasca panen seperti sekarang ini ?

Jawab : Harapan kita petani secara keseluruhan adalah tercapainya kesejahteraan bersama-sama. Sejahteranya bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kopinya laku, laku bareng-bareng lewat koperasi.#



SPI Pasaman Barat Lakukan Aksi Pendudukan Lahan



(Foto). Aksi pendudukan lahan oleh SPI Batang Lambau, Pasaman Barat, Sumatera Barat (29/04).

PASAMAN BARAT. Petani dan masyarakat adat anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Batang Lambau, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat melakukan aksi dengan memasuki lahan yang besengketa dengan PTPN VI (29/04).

Menurut Irwan Hamid, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Sumatera Barat (Sumbar), aksi ini adalah puncak dari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan PTPN VI.

"Penolakan petani dan masyarakat adat terhadap perpanjangan HGU PTPN VI yang akan berakhir HGU nya pada tanggal 31 Desember 2017 tidak diindahkan oleh PTPN VI dengan bukti telah dilakukannya replanting tanaman kelapa sawit di atas lahan yang disengketakan tersebut. Penolakan perpanjangan HGU tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan melalui surat pertanggal 3 November 2014," kata Irwan Hamid.

Januardi, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat mengemukakan, sampai adanya penyelesaian sengketa lahan ini petani SPI akan menduduki lahan bekas perkampungan masyarakat yang digusur oleh PTPN VI dulu.

Januari melanjutkan, kasus sengketa lahan yang berlarut-larut ini seperti bom waktu yang siap meledak suatu saat jika Pemda Pasaman Barat, dalam hal ini Bupati Pasaman Barat tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan di Pasaman Barat.

"Khusus untuk kasus sengketa lahan dengan PTPN VI, seharusnya perusahaan BUMN tersebut menyerahkan kembali tanah petani dan masyarakat adat yang telah dirampas begitu saja dengan mengusir perkampungan, sawah dan pandam perkuburan semenjak tahun 1994 ketika masa HGU mereka berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 nanti. Untuk itu, SPI mendesak Bupati Pasaman Barat dan pihak terkait agar dapat menyelesaikan dan meminta PTPN VI memberikan kembali lahan petani dan masyarakat adat yang tergabung dalam SPI Basis Batang Lambau seluas 1.200 ha setelah HGU perkebunan PTPN VI berakhir," paparnya.

Dalam aksi ini SPI Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengawal aksi memasuki lahan sengketa dengan baik dan mengayomi.

"Namun demikian diharapkan ke depannya agar dapat selalu mengedepankan tindakan persuasif dan humanis dalam menjaga dan mengamankan aksi petani dan masyarakat adat di atas lahan yang disengketakan tersebut," tambah Januardi.

Irwan Hamid menambahkan, SPI Sumbar mencatat, jumlah sengketa lahan antara petani anggota SPI dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan di Sumatera Barat melibatkan 4.282 KK dengan luas lahan yang di sengketa 18.288 hektar. Di Pasaman Barat sendiri sengketa lahan petani dan masyarakat adat anggota SPI mencapai 17.353 Ha dengan melibatkan 3.290 KK. Belum lagi sengketa lahan yang tidak terselesaikan diluar anggota SPI hingga sekarang.

"Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah Pasaman Barat untuk dapat mengambil langkah-langkah yang berpihak kepada petani dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Tentu dengan kembali kepada Undang-Undang Pokok Agraria N0 5 tahun 1960 sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33. Hal ini merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agraria yang sejati dan berkeadilan," imbuhnya.

Gandeng Komnas HAM, SPI Riau Usahakan Penyelesaian Konflik Agraria



(Foto). Diskusi penyelesaian konflik agraria di Kampar, Riau, (28/04).

KAMPAR. Guna percepatan penyelesaian konflik lahan antara petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau dengan PT RAKA, SPI Riau menerima kunjungan Komnas HAM di sekretariatnya di Kampar, Selasa (28/04). Kunjungan Komnas HAM ke SPI Riau ini adalah kali kedua sejak petani SPI menyurati Komnas HAM mengenai penyelesaian konflik lahan di daerahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Panitia Persiapan Wilayah (PPW) SPI Riau, Misngadi menyatakan, seharusnya PT RAKA diusir dari Tapung Hilir karena tidak memiliki izin apa pun dalam menjalankan usahanya. Ia juga menegaskan agar pemerintah mendesak PT RAKA untuk mengembalikan status kawasan hutan tersebut sebagaimana mestinya sehingga dapat dikelola oleh masyarakat setempat.

“Akibat perusahaan tersebut tidak mempunyai izin negara telah dirugikan, seperti pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar ke negara oleh perusahaan tersebut. Di sisi lain, kami petani juga selalu diganggu dan dikriminalisasi oleh mereka sehingga kami tidak dapat bertani dan menghidupi keluarga kami dengan tenang,” tutur Misngadi

Keesokan harinya, Rabu (29/04), sebagai tindak lanjut diskusi, pihak Komnas HAM berupaya menemui dan berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Kampar dan jajarannya. Namun pada waktu yang telah disepakati pihak Bupati maupun Wakil Bupati Kampar mendadak ada keperluan lain. Sehingga diskusi tersebut hanya dihadiri oleh Dinas Kehutanan Kampar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, perwakilan Bupati, dan Komnas HAM itu sendiri.

“Padahal sudah jauh hari kami memberitahukan perihal kunjungan ini. Diskusi jadinya cuma dihadiri oleh mereka-mereka yang tidak bisa mengambil keputusan di Kabupaten Kampar ini,” kata Misngadi.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menyatakan, tidak hadirnya bupati, wakil bupati, dan asisten I Kabupaten Kampar dalam diskusi ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Pemkab Kampar tidak memiliki itikad baik untuk melindungi warganya, terutama warga Kota Garo yang sudah berkonflik hampir 10 tahun.

“Padahal dari tahun 2006 masyarakat telah dirampas tanahnya, dibongkar rumahnya dan terusir dari tempat tinggalnya, hilang mata pencahariannya yang pada akhirnya menimbulkan trauma bagi masyarakat. Selama ini pula belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemkab Kampar untuk menyelesaikan konflik tersebut,” kata Dianto.

Sementara itu dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kampar menyatakan bahwa Lahan yg bersengketa dengan PT RAKA adalah masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Jadi secara otomatis PT RAKA adalah ilegal, karena perusahaan tersebut tidak pernah mengajukan pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit,” kata Misngadi lagi.

Hal senada diutarakan BPN Kampar yang menyatakan bahwa PT RAKA tidak pernah mengajukan izin HGU ke BPN Kampar, sehingga keberadaan perusahaan tersebut tidak terdaftar di Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Komnas HAM bersama SPI Riau juga sudah berusaha untuk melakukan dialog dengan PT RAKA. Namun sayangnya, pihak PT RAKA juga tidak menunjukkan itikad baik untuk mau berdialog dengan petani SPI, dan pihak Komnas HAM.#

SPI Lampung: Penting, Pembangunan Demplot Pertanian Agroekologi



(Foto). Diskusi pertanian agroekologis di Pringsewu, Lampung (28/04).

PRINGSEWU. Pembangunan demplot pertanian agroekologis atau organik sangat penting. Hal itu diutarakan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung Muhlasin saat menerima kunjungan anggota DPD RI Anang Prihantono di sekretariat SPI Lampung di Pringsewu (28/04).

Dalam pertemuan tersebut Muhlasin menyampaikan, demplot pertanian agroekologi mutlak dibangun agar para petani yang masih menggunakan sistem konvensional yakin dan percaya.

“Cara bertani agroekologis ini kan mampu menghasilkan pangan yang sehat dan hasil panen yang tidak kalah dengan pertanian konvensional. Maka dari itu pembangunan demplot menjadi penting agar menjadi bukti kongkrit,” kata Muhlasin.

Dalam diskusi Muhlasin menyampaikan, salah satu penyebab banyaknya petani sekitar Pringsewu enggan beralih menggunakan pupuk organik adalah kepemilikan lahan.

“Disini kebanyakan petaninya tidak punya lahan jadinya mereka menyewa lahan. Kalau pun ada yang punya lahan luasnya tidak lebih dari 2.500 meter persegi. Akibatnya mereka takut kalau menggunakan pupuk organik hasil panennya malah tidak maksimal,” kata Muhlasin.

Meski demikian, sambung Muhlasin, SPI Lampung sendiri telah memiliki demplot-demplot pertanian organik dan menerapkannya langsung dalam kegiatan bertani setiap hari, walau jumlahnya masih terbatas.

“Kami SPI Lampung secara rutin memproduksi pupuk bokashi yang notabene pupuk organik untuk melepaskan ketergantungan kami dari pupuk dan pestisida kimia,” ungkap Muhlasin.

Muhlasin menambahkan, pemerintah harus mendukung inisiatif-inisiatif petani yang ingin mandiri dan berdaulat, mulai dari benih asing, pupuk kimia, dan lainnya.

“Peran pemerintah sangat vital. Pemerintah harus hadir mengakomodir kepentingan kami petani kecil,” tambahnya.

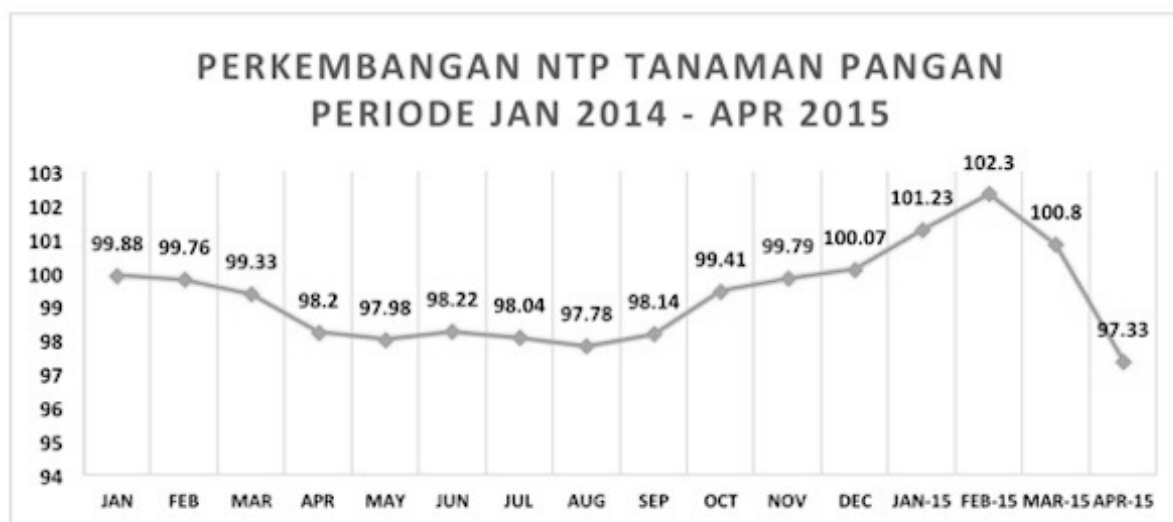
Menanggapi hal ini, Anang Prihantono menyampaikan pihaknya mengapresiasi inisiatif SPI Lampung.

“Kami akan terus bekerja bersama petani. Kami juga mendukung penguatan ormas tani,” tuturnya.



(Foto). Ketua SPI Lampung Muhlasin menunjukkan lahan pertaniannya kepada anggota DPRD Pringsewu (28/04).

NTP Pangan Mei 2015 (Sudah) Turun, Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras



“Jika pemerintah impor beras, NTP akan semakin jatuh”

JAKARTA. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 4,71 persen pada kuartal pertama tahun 2015. Ini menurun dibandingkan jika dibandingkan dengan kuartal keempat 2014 (5,01 persen).

Khusus untuk sektor pertanian, ia memberikan kontribusi pertumbuhan PDB sebesar 0,5 persen. Pertanian juga mempunyai daya yang serap tinggi untuk sektor tenaga kerja. BPS mencatat terdapat 40.12 juta orang yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama sampai bulan Februari 2015. Dari tahun 2005, perkembangan jumlah tenaga kerja menunjukkan kecenderungan tetap pada kisaran 40 hingga 42 juta orang (lihat grafik).

Meski demikian, menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tidak simetris dengan kesejahteraan petani.

“Hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, angka kemiskinan desa yang selalu lebih tinggi dari angka kemiskinan kota, dan Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun,” kata Henry di Medan, (14/05/2015).

Ketua Umum SPI ini melanjutkan, untuk NTP Bulan Mei 2015, BPS mencatat terjadi penurunan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat. NTP tanaman pangan (terutama) turun sebesar 3,44 persen, NTP hortikultura turun sebesar 1,02 persen, dan NTP perkebunan rakyat turun sebesar 0,40 persen dari bulan Maret 2015.

Penurunan tajam NTP tanaman pangan dari 100,80 menjadi 97,33 disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima oleh kelompok petani padi sawah. Periode waktu antara panen dan musim gadu rupanya menjadi periode yang menyedihkan bagi petani. Selama April 2015, harga gabah kualitas rendah ditingkat petani hanya dihargai Rp. 3.592,24 per kilogram. Ini turun 7,39 persen dibanding bulan sebelumnya. Sementara, di penggilingan gabah diharga “cuma” Rp. 3.670,00 per kilogram atau turun 7,17 persen dibanding periode sebelumnya.

“Padahal Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700 per kilogram,” papar Henry.

Selain turunnya harga gabah dan lemahnya penyerapan pemerintah, faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 500 per liter dan angkutan transportasi juga turut andil rendahnya NTP tanaman pangan. Hal tersebut dibuktikan juga dengan laporan BPS pada April ini. Inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen ternyata disebabkan oleh naiknya indeks kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 2,24 persen.

Sementara itu, menurut data Kementerian Perdagangan April 2015, harga beras medium di pasar juga mengalami penurunan. Harga beras medium pada awal April (01/04) sebesar Rp. 10.078 per kilogram, yang kemudian turun pada akhir April (30/04) menjadi Rp. 9.845.

Asep, Ketua SPI Kabupaten Pandeglang Banten menyampaikan bahwa di Kabupaten Pandeglang, harga Gabah Kering Panen (GKP) berkisar antara Rp. 3.700 – Rp. 4.500 per kilogram. Sementara itu, harga Gabah Kering Giling (GKG) adalah Rp. 5.000 per kilogram. Sedangkan harga beras terendah adalah Rp. 7.000 per kilogram.

“Harga beras tersebut lebih rendah dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sudah diberlakukan sebesar Rp. 7.300 per kilogram,” kata Asep.

Oleh karena itu, Henry Saragih menambahkan, di tengah fakta menurunnya NTP pangan ini, pemerintahan Jokowi jangan sampai melakukan impor beras.

“Apa pun ceritanya, jangan sampai kita impor beras. Jika pemerintah impor beras, maka NTP akan semakin jatuh. Petani pangan yang mayoritas mengandalkan padi, akan semakin miskin.”

“Ini sudah lampu kuning untuk Indonesia. Pemerintah bukan hanya harus ‘kerja, kerja, kerja’. Pemerintah harus bekerja keras, bekerja keras lagi, bekerja lebih keras lagi.”

“Ini demi visi misi kedaulatan pangan di Indonesia yang sudah tercantum di dalam Nawa Cita Jokowi-JK,” tutup Henry.#

NTP Perkebunan Terus Turun, Perlu Ada Moratorium Pengembangan Kelapa Sawit

PERKERMBANGAN NTP TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
PERIODE JAN 14 - APR 15



JAKARTA. Sama halnya dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan Hortikultura, NTP perkebunan rakyat terus mengalami penurunan dari 97,46 pada bulan Maret 2015 menjadi 97,07 pada bulan April 2015. Kondisi NTP Tanaman Perkebunan Rakyat menunjukkan bahwa kesejahteraan petani perkebunan semakin mengkhawatirkan karena dalam lima bulan terakhir, nilainya selalu kurang dari 100.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, penurunan ini disebabkan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) dan harga minyak sawit mentah (CPO).

"Pada saat ini saja petani sawit hanya mendapatkan harga TBS-nya itu pun di tingkat pengumpul pada kisaran harga Rp.1600 – Rp 1800 per kilogram. Sementara harga CPO berkisar pada harga Rp.7000 – 8000 per kilogram dan minyak goreng dengan harga Rp. 11.233 per kilogram pada bulan April," kata Henry di Medan (16/05).

"Dengan ragam harga tersebut, industri kelapa sawit tidak dapat mensejahterakan petani kelapa sawit karena mereka hanya bagian dari titik pertama dalam rantai nilai kelapa sawit," kata Henry lagi.

Henry menambahkan, bila kemudian ada upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan ekspor sawit untuk mendongkrak devisa, diperkirakan pada bulan Mei ini harga bea keluar untuk ekspor kelapa sawit akan tetap 0 persen.

"Namun upaya tersebut belum tentu memberi dampak ikutan berupa kenaikan kesejahteraan petani sawit, selama model produksi industri sawit masih tidak berubah," imbuhnya.

"Sekarang saja meskipun ekspansi sawit semakin tinggi, namun tetap saja menyisakan NTP petani perkebunan yang rendah dan terus menurun. Tidak ada insentif yang signifikan bagi petani perkebunan rakyat dalam rantai nilai kelapa sawit. Moratorium pengembangan kelapa sawit menjadi perlu ketika kesejahteraan petani sawit tidak kunjung meningkat dan sekaligus kerusakan alam meningkat sejalan dengan peningkatan luasan perkebunan kelapa sawit," tambahnya.#

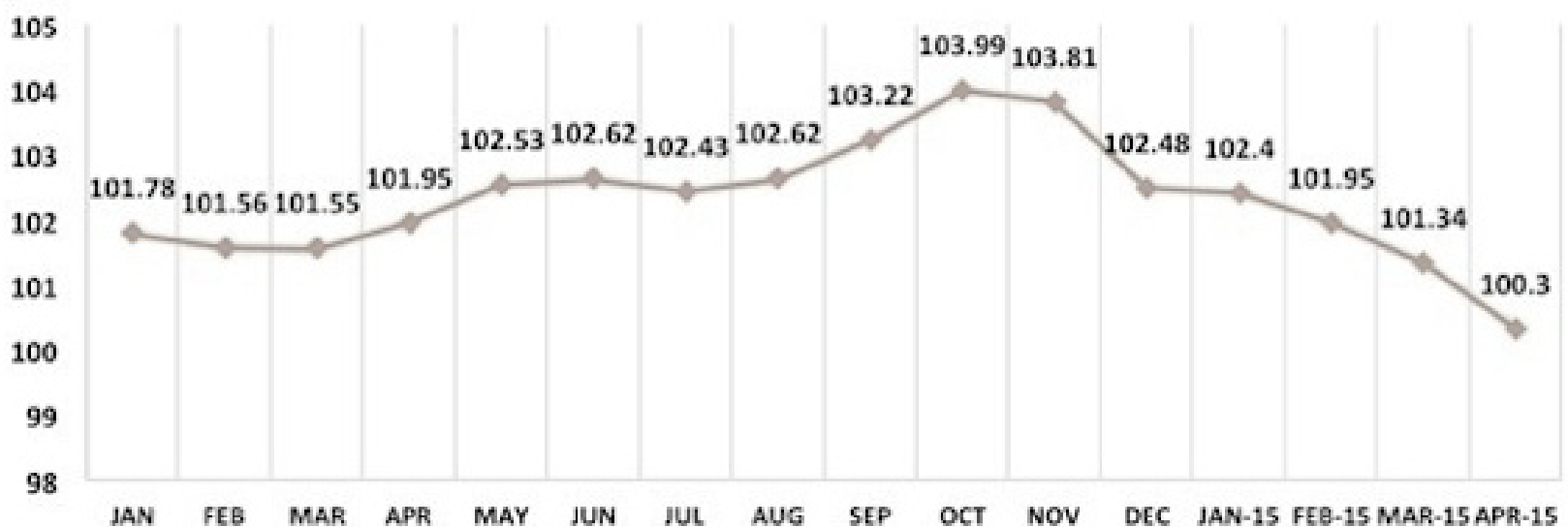
www.spi.or.id



Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

NTP Hortikultura Mei 2015 Turun Lagi, Program Pemerintah Belum Berjalan ?

PERKEMBANGAN NTP HORTIKULTURA PERIODE JAN 2014 - APR 2015



JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman hortikultura kembali mengalami penurunan dari 101,34 pada bulan Maret 2015 menjadi 100,30 pada bulan April 2015. Lagi-lagi ini merupakan peringatan keras buat pemerintah, terutama Kementerian Pertanian.

Penurunan NTP Hortikultura umumnya disebabkan turunnya beberapa harga komoditas kelompok sayuran, khususnya cabai rawit dan cabai merah. Menurut data Kementerian Perdagangan RI, harga cabai merah pada awal April sebesar Rp. 24.105 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp. 22.994 pada akhir April.

Di sisi lain inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen juga menjadi sebab lain. Inflasi khusus di daerah pedesaan ini dipicu oleh kenaikan biaya transportasi dan komunikasi. Kedua biaya ini naik karena imbas kenaikan harga BBM.

Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian input produksi hortikultura untuk musim tanam berikut. Kenaikan biaya produksi dan tambahan modal ini jelas mempengaruhi turunnya NTP hortikultura.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, dalam kondisi ini, pemerintah seharusnya melakukan cara yang efektif seperti peningkatan proses pascapanen sehingga nilai tambah yang diperoleh petani menjadi meningkat.

"Jika produksi hortikultura lancar dan ditampung pasar domestik, sebenarnya tak akan jadi masalah," ujar Henry lagi.

"Masalahnya, sayur dan buah-buahan kita juga harus bersaing ketat dengan produk impor. Sementara, pengolahan pascapanen ketinggalan. Diversifikasi produk tidak ada, barang menumpuk, busuk. Petani jadi tak dapat penghasilan," sambungnya.

"Sejak Oktober 2014, NTP hortikultura terus turun. Apakah ini artinya program pemerintah baru belum berjalan dengan baik? Kita tahu pemerintahan baru, menteri baru, butuh waktu. Tapi sampai kapan? Karena nasib petani semakin di ujung tanduk," tanya Henry di Medan (15/05).

Henry mengemukakan, sebenarnya secercah harapan muncul untuk petani hortikultura sejak Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* UU Hortikultura (No. 13/2010) perihal investasi asing di industri benih lebih dari 30 persen pada Maret 2015 yang lalu.

"Ini berarti petani hortikultura mempunyai kesempatan yang besar untuk memproduksi dan mengembangkan benih lokal hortikultura mereka, serta tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian benih. Secara teori, biaya input turun, NTP naik. Nah, ini malah sebaliknya," tutur Henry

"Berarti kan ada yang belum jalan. Terhambat. Tidak cepat. Tidak efisien. Harus cepat dong. Petani siap kerja keras bersama pemerintah," tegas Henry.

Henry menambahkan, demikian pula momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan program "Desa Berdaulat Benih" bersama petani.

"Mumpung belum dieksekusi. Kita punya momentum untuk perbaikan. Sebaliknya membangun hortikultura bukan dengan perusahaan-perusahaan besar, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan baik *World Economic Forum on East Asia* dan *The Asian African Business Consultation* di Jakarta pada Bulan April yang lalu," tambahnya.#

SPI Serdang Bedagai Gotongroyong Bedah Rumah Petani



(Foto). Foto bersama petani Desa Pamah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, saat bergotongroyong membangun rumah untuk petani anggotanya (16/05).

SERDANG BEDAGAI. Dianggap tak layak huni lagi, para petani anggota Serikat Petani Indonesia dari Desa Pamah, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengadakan gotongroyong memperbaiki rumah salah satu anggotanya.

Menurut penuturan Ketua SPI Basis Pamah Jekson Purba, kegiatan bedah rumah ini adalah inisiatif dari para petani anggota SPI yang melihat kesusahan saudara sesama petani.

“Rumah tersebut milik Bapak Warisno yang tinggal bersama istri dan tiga orang anaknya. Rumahnya sudah tidak sangat layak huni,” kata Jekson, Sabtu (16/05).

Jekson mengemukakan, biaya perbaikan rumah ini bersumber dari dana gotong royong seluruh anggota basis SPI Pamah yang merupakan wujud nilai kebersamaan.

“Meskipun hanya bisa membuat rumah sederhana, tapi yang terpenting adalah rasa kebersamaan dan tolong menolong sesama anggota,” ungkap Jekson.

Jekson melanjutkan, gotongroyong bedah rumah ini mendapat respon positif dari pemerintah Kecamatan Silinda.

Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah menambahkan, solidaritas sesama anggota organisasi ini perlu terus dipupuk dan dijaga.

“Hal-hal seperti inilah yang perlu untuk terus rutin dilaksanakan, karena selain mampu memperkuat internal organisasi hal ini mampu memperkuat rasa empati kita terhadap kesusahan yang dihadapi orang lain,” tambahnya.#

Perberasan Tidak Boleh Dibuka Kepada Korporasi



(Foto). FGD bertemakan "Kebijakan Perberasan Nasional yang Mensejahterakan Petani" di sekretariat DPP SPI di Jakarta (20/05).

JAKARTA. Perberasan tidak boleh dibuka lebar-lebar kepada korporasi. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam acara FGD (*focus group discussion*) bertemakan "Kebijakan Perberasan Nasional yang Mensejahterakan Petani" di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI di Jakarta (20/05).

Dalam acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Aliansi Petani Indonesia (API) ini, Henry menyampaikan, kegiatan prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2016 pada poin satu menerangkan bahwa food estate akan dibangun di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kepulauan Aru. Sedangkan di tahun 2015 ini sudah direncanakan berdiri *food estate* di Merauke.

"Hal ini menyimpang dari kedaulatan pangan sehingga trisakti dapat berubah menjadi trilogi kemiskinan (kemiskinan, kelaparan, konflik agraria). SPI menolak food estate karena masih menggandeng korporasi yang berbasis keuntungan. Hal ini berarti Kementan tidak percaya dengan petani untuk menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia," jelas Henry.

Hal senada diungkapkan Ketua Departemen Luar Negeri SPI Zainal Arifin Fuad. Ia menggarisbawahi bahwa selain menolak masalah perberasan dibuka kepada korporasi, SPI juga meminta pemerintah agar menutup peluang impor pangan.

"Swasembada beras (pangan) itu bukan dari hasil impor, pemerintah harus upayakan swasembada absolut menuju Indonesia yang berdaulat pangan," imbuhnya.

Sementara itu, Rivai dari API menyampaikan, secara makro, jika asumsi konsumsi sebesar 114 kilogram per kapita per tahun dikalikan dengan penduduk Indonesia sebesar 255 juta, maka kebutuhan beras hanya sekitar 29 juta ton per tahun.

"Dengan produksi sebesar 35,5 juta ton, maka kita sudah surplus sekitar 5 – 6 juta ton. Pemerintah harus mengembalikan Bulog sebagai stabilisator harga," ungkapnya.

Perwakilan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Maino mengutarakan, walaupun Wakil Presiden sudah menyatakan besaran konsumsi beras perkapita pertahun sebesar 114 kg, namun Kementan masih berpatokan pada angka 124,89 kilogram per kapita per tahun.

Sementara itu Dani Setiawan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Komoditas beras menyampaikan Bulog diamputasi untuk kepentingan liberal.

"Bulog haruslah punya otoritas," katanya.

Menanggapi hal ini, Lely Pelitasari, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, yang juga turut hadir dalam acara ini menjelaskan, saat ini Bulog tidak dirancang untuk menjadi raksasa, salah satunya diakibatkan konsekuensi dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Kami dari Bulog meminta gambaran besar kepada pemerintah, namun staf kepresidenan menyerahkan kembali kepada Bulog untuk ditempatkan di posisi mana. Dalihnya adalah Bottom up. Jika dahulu, Bulog bersandar pada Kementerian Koperasi yang sekaligus sebagai Direktur Bulog. Namun hari ini Bulog tidak memiliki sandaran yang kokoh," paparnya.#

Petani dan Buruh Bersatu Lawan Korporatisasi



(Foto). Aksi solidaritas petani SPI memperingati Hari Buruh Internasional di depan Istana Presiden, Jakarta, Mei 2012.

JAKARTA. Nasib buruh kecil tidak jauh berbeda dengan nasib petani (kecil) di Indonesia. Hal ini diutarakan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2015 di Jakarta (01/05).

Menurutnya terpuruknya buruh dan petani diakibatkan oleh krisis kapitalisme global. Salah satu penjelmaan sistem kapitalisme global adalah korporatokrasi dimana korporasi, lembaga keuangan dunia, dan penyelenggara pemerintahan yang bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat mengikuti kehendak mereka, yang saat ini semakin menancapkan kukunya dalam setiap aspek kebijakan di Indonesia.

Henry menjelaskan bahwa perusahaan baik yang berskala multinasional (MNCs), transnational (TNCs) maupun nasional, telah menjadi aktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan politik pembangunan sebuah bangsa di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan secara global.

"Kekuasaan korporasi sebagai representasi pasar telah masuk ke berbagai sendi dasar kehidupan manusia mau-pun kebijakan negara. Sudah berapa banyak perusahaan yang mengusir petani dari tanahnya sendiri? Sudah berapa banyak korban yang jatuh akibat kriminalisasi perusahaan yang memaksa rakyat keluar dari tanah nenek moyangnya? Sudah berapa banyak perusahaan yang menghancurkan alam Indonesia? Sudah berapa banyak buruh yang dirumahkan dan dirugikan akibat sistem outsourcing? Sudah berapa banyak yang ditindak?" tegas Henry.

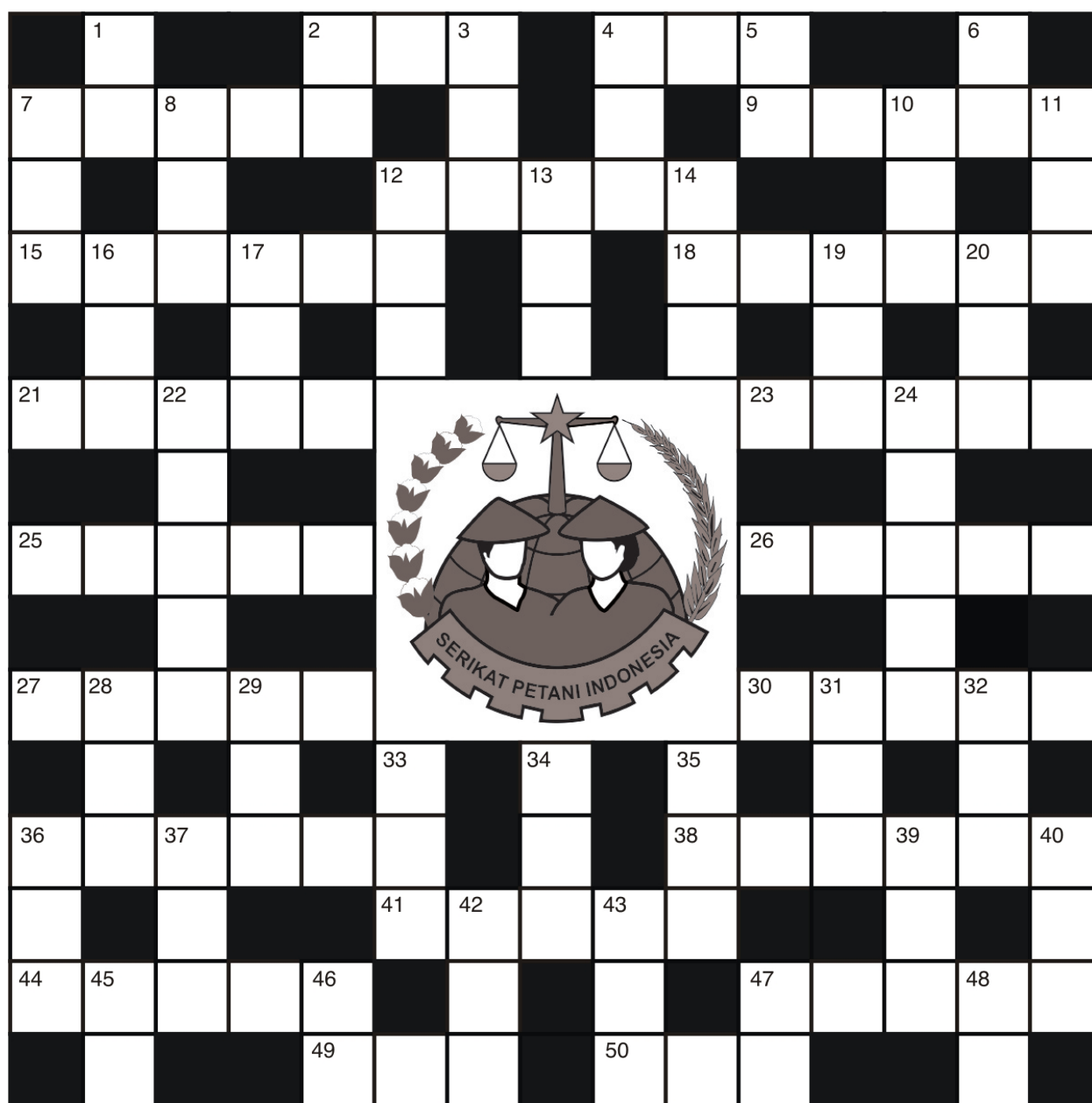
Henry berpendapat, pemerintah harus membangun industrialisasi nasional yang dapat mengolah sumber daya alam mentah Indonesia yang melimpah yang selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan menjadi kekuatan utama untuk membangun industri nasional, sehingga perekonomian kita tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang cenderung tidak memberi manfaat besar bagi kita. Dalam prakteknya nanti BUMN juga bisa menggandeng usaha-usaha keluarga tani dan koperasi." tutur Henry.

Oleh karena itu Henry menambahkan, SPI mengucapkan selamat hari buruh internasional, untuk semua buruh mulai dari buruh pabrik di perkotaan hingga buruh tani di pedesaan. SPI menyambut rencana kaum buruh di Indonesia untuk memperkuat organisasinya dan membangun aliansi dengan kekuatan di luar buruh dalam rangka membangun gerakan politik buruh.

"Karena buruh tak cukup hanya berjuang untuk tuntutan yang bersifat normatif tapi harus pada perjuangan politik mengubah relasi hubungan buruh dengan korporasi dan juga merubah sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia yang harus menjalankan suatu tatanan demokrasi ekonomi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945," tutup Henry.#

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 054

**MENDATAR**

2. Bagian dari kendaraan 4. Alat penyimpan barang 7. Penyubur tanaman 9. Jatuh berlingang
12. Rasa ingin makan 15. Bangunan tinggi 18. Rasa peduli terhadap sesama 21. Terlalu pelit 23. Suku di Papua 25. Banyak lembarannya 26. Panggilan untuk lelaki yang lebih tua 27. Wisatawan 30. Meletakkan sesuatu (biasanya secara perlahan) ke dalam wadah 36. Ngobrol 38. Usaha merebut kekuasaan 41. Bagian dari candi 44. Rusak, sedikit pecah, terbelah 47. Renovasi 49. Metode pembayaran 50. Perkebunan Inti Rakyat

MENURUN

1. Ormas Islam di Indonesia 2. Tanda nomor kendaraan di Sumatera Utara 3. Liga bola basket Amerika Serikat 4. Alat pengeras suara 5. Sekolah Dasar 6. Diulang, gaya dalam renang 7. Perusahaan Air Minum 8. Pekan Olahraga Nasional 10. Senang, gembira 11. Dengki 12. Teknik menyambung besi 13. Pendapatan Asli Daerah 14. Untuk mengurangi kecepatan kendaraan 16. Udang kering 17. Baterai basah 19. Pembaruan Agraria Sejati 20. Lanjut usia 22. Berita 24. Tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau, atau sungai lain 28. Singkong 29. Kasihan 31. Undang-Undang Dasar 32. Jaring 33. Daerah Aliran Sungai 34. Surga terletak di bawah telapak kakinya 35. Satu (Sansekerta) 36. Alat pertukangan 37. Pewarna benda 39. Telur (Inggris) 40. Sumber kehidupan 42. Satuan berat 43. Jenis musik 45. Air didinginkan 46. Keluarga Berencana 47. Pekerjaan rumah 48. Angkatan Laut

Sambungan dari hal.6

Sementara itu, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan petani SPI Basis Batang Lambau ini berlokasi di Banja Batang Lambau Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali. Dahulunya merupakan tanah ulayat Ninik Mamak Imbang Langik yang awalnya diklaim Pemda Kabupaten Pasaman (sebelum pemekaran) sebagai tanah negara bekas Erfacht. Selanjutnya diserahkan untuk perkebunan kelapa sawit PTPN VI Ophir (kebun Inti III dan IV). Kebun Inti III dan IV bagian dari HGU PTPN VI (Persero) Kebun Ophir seluas 3.549.16 Ha sesuai sertifikat Nomor : 1 tanggal 27 April 1994 dan berakhir 31 Desember 2017.

Semenjak perkebunan kelapa sawit PTPN VI Ophir dibuka tahun 1982, pada masa proses pengurusan HGU dan hingga saat ini dalam perkembangannya menimbulkan banyak permasalahan dengan melibatkan banyak pihak dan berujung pada tindakan pengusiran masyarakat dari tanahnya dan kriminalisasi terhadap salah seorang Ninik Mamak karena memperjuangkan hak ulayatnya. Kampung Banja Batang Lambau ditempati oleh anak-cucu dan kemenakan Ninik Mamak Imbang Langik sebanyak 40 KK secara turun temurun, setelah diusir oleh PTPN VI tahun 1982 mereka terpaksa menetap di kampung sebelahnya yang masih berada dalam nagari Kinali, sebagian pindah ke nagari lain di Kabupaten Pasaman Barat, bahkan ada yang merantau keluar Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini anak cucu kemenakan Ninik Mamak Imbang Langik ini sudah berkembang menjadi 245 kepala keluarga (KK).#



Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

www.spi.or.id

Bekerjasama dengan AEC, SPI Bantul Perkenalkan Bertanam Metode Tapak Macan



(Foto). Petani yang bertanam dengan metode tapak macan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta.

BANTUL. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bantul, Yogyakarta, bekerjasama dengan *Agricultural Entrepreneur Clinic* (AEC) memperkenalkan cara bertanam dengan menggunakan metode tapak macan. Hal ini ditandai dengan prosesi tanam padi perdana di lahan selus 3.000 meter persegi di Dusun Palihan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, Sabtu (16/06).

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Bantul Sumantoro menyampaikan, metode tapak macan adalah bertanam dengan membentuk segitiga, dimana setiap sisi berjarak tujuh centimeter. Sementara jarak antara segitiga tanaman satu dengan segitiga tanaman lain 30 centimeter.

"Jadi metode ini hanya membutuhkan satu bibit untuk setiap penanaman, akibatnya penggunaan air akan lebih hemat, dan menggunakan pupuk organik baik kompos ataupun cacing," kata Sumantoro.

Sumantoro melanjutkan, metode tanam ini baru pertama kali diperkenalkan di Bantul, Yogyakarta. Namun sesungguhnya kata Sumantoro, metode ini sudah banyak diterapkan di wilayah Sulawesi, Aceh, dan lainnya.

"Dengan metode tapak macan ini, hasil panen meningkat 16 – 17 ton per hektar, hemat air dan juga hemat bibit karena setiap lubang tanam hanya membutuhkan satu batang yang nantinya akan berkembang pesat, dan tentunya berasnya akan lebih sehat dikonsumsi karena menggunakan pupuk organik," terang Sumantoro.

Hal senada dituturkan Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Hariyono. Ia menyatakan, bertanam padi dengan menggunakan metode tapak macan berpotensi menghasilkan panen yang lebih besar.

"Setelah berumur dua bulan hasilnya akan terlihat berbeda. Dalam satu rumpun padi dengan metode tapak macan rata-rata berisi 45 anakan, sedang yang konvensional hanya 20-25 anakan saja. Oleh karena itu kami dari SPI Bantul dan Yogyakarta juga mengucapkan terimakasih atas dukungan teman-teman dari AEC, khususnya Bapak Ir. Arif Budiman atas bantuan dan dukungannya," ungkapnya.

Tri menegaskan, dengan menggunakan metode ini, petani bisa melepaskan ketergantungannya dari input-input kimia yang tidak menyehatkan, dan hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan swasta transnasional yang hanya mengejar keuntungan.

"Metode ini tentu saja ramah lingkungan," kata Tri lagi.

Tri menambahkan, pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam pencapaian target produksi pangan, selain itu juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menampung tenaga kerja yang cukup besar.

"Sehingga pembangunan sektor pertanian yang menjadikan petani kecil sebagai produsen pangan utama sebagai strategi pembangunan bangsa harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari tingkat lokal hingga nasional," imbuhnya.

"Untuk itu kami petani SPI menuntut kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan nasib petani kecil yang meski masih sering dinomorduakan namun mampu menghasilkan inisiatif-inisiatif yang mampu menegakkan kedaulatan pangan," tambahnya.#